

DAFTAR PUSTAKA

- Aidi, Zil. "Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan." *Universitas Diponegoro*. Semarang, 2023.
- B., Erlina. *Hukum Perdata Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2021.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud RI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2023.
- Badan Pusat Statistik. "Sensus Penduduk 2020." <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>, 2020.
- Bidasari, Anindya. "Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan atas Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir (afwezigheid)." *Jurnal Panorama Hukum* 1, no. 2 (2016). www.nurhendroputranto.com.htm,.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 4 ed. St. Paul: West Publishing Co., 1968.
- Canggayuda, Joel, Hana Sri Puji Rahayu, dan Anindya Haswaningrum. "Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan." *Privat Law*, no. 7 (2015).
- Dewi, Anak Agung Krisna Kumala, I Nyoman Putu Budiarta, dan Diah Gayatri Sudibya. "Hak Waris bagi Ahli Waris yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 11–15. <https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2370.11-15>.
- Harahap. M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Heriyani, Endang, dan Prihati Yuniarlin. "Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak hadir (afwezig) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY." *Jurnal Transparansi Hukum* 2, no. 1 (2019): 17–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30737/transparansi.v2i1.339>.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). *Living with Absence: Helping the Families of the Missing*. Jenewa: ICRC, 2014. www.icrc.org.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

- Kanwil Babel. “Pengertian BHP,” 2022.
<https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/balai-harta-peninggalan?csrt=11644102783235745770>.
- Kanwil DKI Jakarta. “Pengurusan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid),” 2020.
<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-harta-kekayaan-yang-pemiliknya-dinyatakan-tidak-hadir-afwezigheid>.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- National Missing Persons Coordination Centre. “Why People Go Missing,” t.t.
<https://www.missingpersons.gov.au/about/why-people-go-missing>.
- Nisa, Anis Ismatun, dan R.A. Antari Innaka T. “Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris yang Berada dalam Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) yang Kemudian Kembali Pulang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Universitas Gadjah Mada, 2021. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.
- Novianti, Imaniar Putri. “Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus.” *Pandecta* 10, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1>.
- Ria, Wati Fahmi, dan Muhammad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018.
- Ridwan, Muannif, Saman Sulaiman, dan Abdul Bari Azed. “Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia.” *Al-Ahkam* 17, no. 1 (2021): 39–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/ajh.v17i1.4739>.
- Rifai, Muhammad, Dahlan Ali, dan Mahfud. “Kegunaan Sidik Jari dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal untuk Mengetahui Identitas Korban dan yang Melakukan Perbuatan Pidana.” *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (2019).
- Rudito, Sulih. “Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 3 (2015).
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021. www.penerbitbukumurah.com.

- Santoso, Aris Prio Agus, dan dkk. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022.
- Simamora, Sovia Febrina Tamaulina. “Surat Keterangan Hak Waris dalam Ketentuan Hukum Waris Nasional.” *Visi Sosial dan Humaniora (VSH)* 3, no. 2 (2022). <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora>.
- Soepomo, R. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2013.
- Soerjopratiknjo, Hartono. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1983.
- . *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1984.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Wijaya, Angelia. “Cara Lapor Orang Hilang ke Polisi,” 2023. <https://perqara.com/blog/cara-lapor-orang-hilang-ke-polisi/>.
- Yunanto. “Menerjemahkan Keadilan dalam Keputusan Hakim.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019).

Peraturan perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Penetapan Pengadilan Negeri:

Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 39/Pdt.P/2014/PNCJ.

Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 53/Pdt.P/2015/PN.
Krg

Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 489/Pdt.P/2020/PN Sng